Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO)
Vol. 4, No. 6, 2026: 427-452

Iran's Foreign Policy Communication Through Legitimacy Strategy Rejection of the Ceasefire (Noam Chomsky's Critical Approach to the Case of the Iran-American War for the March 2026 Period)

Priadji[1]*, Prasetya Yoga Santoso[2], Adiella Yankie Lubis[3], Sunarto[4], Novalia Agung Wardjito Ardhoyo[5], Gloria Angelita Tomasowa[6]
[1, 2, 6]Universitas Sahid, Jakarta
[3, 4, 5] Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta
Corresponding Author: Priadji priadjiepriadjie@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Keywords: Political Communication, Political Legitimacy, Model Propaganda, Armistice

Received: 5 April
Revised: 25 May
Accepted: 26 June

©2026 Priadji, Santoso, Lubis, Sunarto, Ardhoyo, Tomasowa: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

A B S T R A C T

This study analyzes Iran's foreign political communication in establishing legitimacy for the rejection of the ceasefire in the Iran–American conflict in the March–April 2026 period. The rejection is understood not solely as a diplomatic decision, but as a political communication practice that constructs sovereignty, the right to self-defense, and resistance to external pressure. The research uses a critical paradigm and qualitative approach with the framework of the Edward S. Herman and Noam Chomsky Propaganda Model, which includes five filters: media ownership, advertising, information sources, pressure (flak), and dominant ideology. The data were critically analyzed by paying attention to the narratives and information of informants about the Iranian and Western media ecosystems. The findings show that media ownership, choice of information sources, narrative pressure, and ideology play an important role in shaping and contradicting the meaning of ceasefire rejection. Iranian media construct rejection as an attempt to defend sovereignty and reject agreements that are considered unfair, while Western media tend to place them in the framework of escalation and security threats. Advertising filters do not appear dominant based on available data. Iran also produces counter-narratives through media channels and diplomacy to gain domestic and international legitimacy. This research confirms that the Propaganda Model needs to be applied contextually and shows that political legitimacy in international conflicts is contested through the production, distribution, and contestation of narratives.

Komunikasi Politik Luar Negeri Iran Melalui Strategi Legitimasi Penolakan Gencatan Senjata (Pendekatan Kritis Noam Chomsky Pada Kasus Perang Iran Melawan Amerika Periode Maret 2026)

Priadji[1]*, Prasetya Yoga Santoso[2], Adiella Yankie Lubis[3], Sunarto[4], Novalia Agung Wardjito Ardhoyo[5], Gloria Angelita Tomasowa[6]
[1, 2, 6]Universitas Sahid, Jakarta
[3, 4, 5]Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta
Corresponding Author: Priadji priadjiepriadjie@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Legitimasi Politik, Propaganda Model, Gencatan Senjata

Received: 5 April
Revised: 25 May
Accepted: 26 June

©2026 Priadji, Santoso, Lubis, Sunarto, Ardhoyo, Tomasowa: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

A B S T R A K

Penelitian ini menganalisis komunikasi politik luar negeri Iran dalam membangun legitimasi atas penolakan gencatan senjata pada konflik Iran–Amerika periode Maret–April 2026. Penolakan tersebut dipahami bukan semata-mata sebagai keputusan diplomatik, melainkan sebagai praktik komunikasi politik yang mengonstruksi kedaulatan, hak membela diri, dan resistensi terhadap tekanan eksternal. Penelitian menggunakan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif dengan kerangka Propaganda Model Edward S. Herman dan Noam Chomsky, yang mencakup lima filter: kepemilikan media, periklanan, sumber informasi, tekanan (flak), dan ideologi dominan. Data dianalisis secara kritis dengan memperhatikan narasi dan keterangan informan mengenai ekosistem media Iran dan Barat. Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan media, pemilihan sumber informasi, tekanan naratif, dan ideologi berperan penting dalam membentuk serta mempertentangkan makna penolakan gencatan senjata. Media Iran mengonstruksikan penolakan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dan menolak kesepakatan yang dianggap tidak adil, sedangkan media Barat cenderung menempatkannya dalam kerangka eskalasi dan ancaman keamanan. Filter periklanan tidak tampak dominan berdasarkan data yang tersedia. Iran juga memproduksi kontra-narasi melalui saluran media dan diplomasi untuk memperoleh legitimasi domestik maupun internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa Propaganda Model perlu diterapkan secara kontekstual serta menunjukkan bahwa legitimasi politik dalam konflik internasional diperebutkan melalui produksi, distribusi, dan kontestasi narasi.

PENDAHULUAN

Dalam kajian ilmu komunikasi kontemporer, komunikasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai proses transmisi pesan dari pengirim ke penerima, melainkan sebagai arena produksi makna, negosiasi realitas, dan reproduksi kekuasaan. Perspektif ini menempatkan komunikasi sebagai instrumen strategis yang menentukan bagaimana realitas politik dikonstruksi, dipahami, dan dipertahankan. Dalam konteks hubungan internasional, komunikasi menjadi elemen vital dalam membentuk legitimasi tindakan negara, membangun citra global, serta mengartikulasikan kepentingan strategis di hadapan publik domestik maupun internasional.

Dalam konteks ini, penolakan Iran terhadap gencatan senjata dalam perang melawan Amerika sejak bulan Maret 2026 menjadi kasus yang menarik untuk dianalisis. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan strategi militer atau diplomatik, tetapi juga merupakan praktik komunikasi politik yang dirancang untuk membangun narasi tertentu, baik untuk konsumsi domestik maupun internasional. Penolakan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari komunikasi politik yang lebih luas, dimana Iran berupaya mendefinisikan dirinya sebagai aktor berdaulat yang menolak tekanan eksternal dan mempertahankan legitimasi politiknya.

Konflik Iran pada Maret 2026 merupakan eskalasi signifikan dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Konflik ini dimulai pada 28 Februari 2026 melalui operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menargetkan fasilitas militer dan nuklir Iran, serta menyebabkan kematian pemimpin tertinggi Iran. Peristiwa ini memicu serangkaian respons militer dan politik dari Iran, termasuk serangan balasan terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk. Iran merespon dengan meluncurkan rudal dan drone ke berbagai target di kawasan, termasuk pangkalan militer dan negara-negara sekutu Barat. Konflik dengan cepat berkembang menjadi perang regional yang melibatkan gangguan terhadap jalur energi global, khususnya Selat Hormuz, yang merupakan salah satu *chokepoint* energi paling vital di dunia.

Dampak konflik ini bersifat multidimensional. Pertama, dampak energi global. Konflik ini menyebabkan gangguan besar pada pasokan energi global. Sekitar 20% pasokan minyak dunia yang melewati Selat Hormuz terdampak, menjadikannya salah satu krisis energi terbesar dalam sejarah. Bahkan analis memperkirakan gangguan produksi mencapai jutaan barel per hari. Yang kedua, dampak kemanusiaan. Perang ini berdampak signifikan terhadap warga sipil, termasuk pengungsian massal dan gangguan layanan publik. Bahkan, terdapat laporan mengenai keterlibatan anak-anak dalam upaya perang serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Ketiga, dampak pada dimensi *digital* dan informasi. Iran menerapkan kontrol ketat terhadap informasi, termasuk pemadaman internet dan distribusi "white SIM cards" untuk mengontrol narasi publik. Ini menunjukkan bahwa konflik juga berlangsung dalam ruang *digital*.

Dalam situasi eskalasi tersebut, berbagai upaya diplomatik dilakukan untuk mencapai gencatan senjata. Namun, Iran secara konsisten menunjukkan sikap ambivalen, bahkan cenderung menolak sejumlah proposal gencatan

senjata yang diajukan oleh mediator internasional. Iran menolak proposal gencatan senjata jangka panjang dan lebih memilih mengajukan skema perdamaian versinya sendiri. Iran menolak kesepakatan gencatan senjata yang tidak memberikan jaminan terhadap penghentian agresi di masa depan.

Pada 8 April 2026, Iran dan Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata sementara selama dua minggu. Namun, sebelum kesepakatan tersebut, Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh mediator internasional. Iran mengajukan proposal alternatif berupa rencana 10 poin, yang mencerminkan upaya mereka untuk:

- Mengontrol kerangka negosiasi
- Mempertahankan posisi tawar
- Mengonstruksi citra sebagai aktor yang berdaulat

Dalam konteks ini, penolakan gencatan senjata dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi performatif, dimana tindakan politik itu sendiri merupakan pesan.

Dari perspektif komunikasi politik, penolakan ini bukan sekadar tindakan diplomatik, melainkan strategi komunikasi politik. Iran menekankan narasi bahwa gencatan senjata tanpa jaminan struktural hanyalah bentuk "jeda taktis" yang menguntungkan pihak lawan. Dengan demikian, penolakan tersebut dikonstruksi sebagai tindakan rasional dan bermartabat. Lebih jauh, dalam kerangka komunikasi internasional, tindakan Iran dapat dipahami sebagai bentuk "*strategic signaling*". Dengan menolak gencatan senjata, Iran mengirimkan sinyal kepada aktor internasional bahwa mereka tidak berada dalam posisi lemah. Hal ini penting dalam konteks negosiasi, karena dalam politik internasional, persepsi kekuatan sering kali sama pentingnya dengan kekuatan itu sendiri. Dengan mempertahankan posisi keras, Iran berusaha meningkatkan *leverage* dalam perundingan yang lebih luas, termasuk terkait program nuklir dan sanksi ekonomi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menggali secara mendalam praktik komunikasi politik Iran dalam konteks penolakan gencatan senjata pada periodesasi konflik Maret 2026. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya propaganda penolakan gencatan senjata perang Iran melawan Amerika pada periode perang Maret sampai April 2026, berdasarkan 5 filter dalam pandangan Noam Chomsky.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai sebuah studi, baru berkembang pada awal tahun 1950-an. Istilah komunikasi politik menurut sejumlah referensi pertama kali dikemukakan secara tegas oleh Euleau, Eldersveld dan Janowitz pada tahun 1956. Secara filosofis, hakikat komunikasi politik adalah kajian tentang kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara, terutama untuk mengatur prilaku dan konflik yang terjadi. Seperti yang didefinisikan **Nimmo (1989)** tentang komunikasi politik, "*Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflicts*". Pandangan

Dan Nimmo, menjelaskan bahwa komunikasi politik memiliki makna penting dalam mengatur hubungan dan konsekuensi antara aktivitas politik dan prilaku manusia, dalam interaksi sosial dan relasinya politik yang terjadi.

Berangkat dari pandangan tersebut, Dan Nimmo mempertegas bahwa komunikasi politik merupakan bidang kajian yang bersifat lintas disipliner (*Political communication as a field of inquiry is cross disiplinary*). Hal tersebut dikarenakan studi komunikasi politik mencakup banyak aktivitas dari berbagai latar belakang keilmuwan. Keputusan Iran untuk menolak suatu proposal perdamaian bukan hanya tindakan diplomatik yang bersifat material, tetapi juga sebuah pesan politik yang dikonstruksi untuk menyampaikan identitas, posisi tawar, dan klaim legitimasi kepada berbagai audiens, baik domestik maupun internasional.

Model Propaganda

Model propaganda yang dikembangkan oleh Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam Andrew Mullen and Jeffery Klaehn (2010), memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana media dan komunikasi digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Model ini berangkat dari asumsi bahwa media tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik yang membentuk bias sistemik dalam penyampaian informasi. Dalam model ini, terdapat lima "filter" utama yang memengaruhi produksi informasi, seperti kepemilikan media, sumber pendanaan, sumber informasi, tekanan (*flak*), serta ideologi dominan. Filter-filter ini bekerja untuk "memproduksi persetujuan" (*manufacturing consent*) terhadap kebijakan politik tertentu (**Mullen dan Klaehn, 2010**).

Herman dan Chomsky mengembangkan apa yang dikenal sebagai Propaganda Model, yang menjelaskan bagaimana berita diproduksi dan diseleksi melalui serangkaian "filter". Filter antaralain Kepemilikan Media, Ketergantungan terhadap Iklan, Sumber Informasi Resmi, Flak dan Tekanan, dan terakhir adalah Konstruksi "Musuh Bersama". Model ini memberikan kerangka analisis untuk memahami mengapa isu-isu tertentu mendapat sorotan besar, sementara isu-isu lain meskipun penting, hampir tidak pernah muncul di ruang publik. Model ini masih relevan hingga kini, terutama dalam era globalisasi informasi dan dominasi media *digital* yang tampaknya menawarkan pluralitas, tetapi justru sering memperkuat konsentrasi kepemilikan media dan polarisasi informasi (**Herman & Chomsky, 2008**).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (**Sugiyono, 2007**).

Metode Analisis Data

Terdapat beberapa tahapan harus yang dilalui ketika melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu *bracketing, intuiting, analyzing,* dan *describing* (**Sarantakos, 2017**).

a. *Bracketing* proses mengidentifikasi dan menahan setiap keyakinan serta pendapat yang sebelumnya telah terbentuk yang mungkin saja ada dan mengenai fenomena atau gejala yang sedang diteliti.
b. *Intuiting* merupakan proses yang terjadi ketika peneliti bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena oleh mereka yang pernah mengalaminya sehingga menghasilkan pemahaman umum mengenai fenomena yang sedang diteliti.
c. *Analyzing* merupakan proses yang melibatkan proses lainnya berupa *coding*, kategorisasi dan memahami arti dari fenomena tersebut.
d. *Describing* merupakan pada tahapan ini, peneliti menjadi mengerti, memahami, dan mendefinisikan fenomena yang ingin diteliti atau dikaji. Tujuannya adalah mengomunikasikan dan menawarkan perbedaan, atau deskripsi kritis dalam bentuk tertulis atau verbal.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Propaganda Model

Jika dibaca menggunakan Propaganda Model Herman dan Chomsky, proses tersebut harus ditempatkan dalam struktur produksi informasi yang lebih luas. Model tersebut pada dasarnya tidak mengatakan bahwa setiap berita merupakan hasil perintah langsung dari negara atau pemilik media. Sebaliknya, model menjelaskan bagaimana struktur kelembagaan, kepentingan ekonomi, sumber informasi, flak, dan ideologi secara sistematis menyaring informasi yang tersedia bagi publik. Karena itu, data penelitian justru memperlihatkan bahwa proses penyaringan berlangsung pada dua ruang komunikasi yang berkompetisi, yakni ekosistem media Iran dan ekosistem media Barat. Disampaikan Ismail Amin seorang akademisi/pengamat politik, berikut ini.

> "… dalam konflik seperti ini, hampir tidak ada media yang benar-benar netral. Media Iran membawa perspektif negara Iran; media Barat banyak membawa perspektif Amerika dan sekutunya. Perbedaannya terletak pada *framing* …".

1. Filter *Ownership*

Pada filter pertama, *ownership*, temuan memperlihatkan bahwa media Iran beroperasi dalam struktur negara dan kepentingan politik Republik Islam, sementara media Barat beroperasi dalam struktur kelembagaan dan kepentingan politik-ekonomi yang berbeda. Disampaikan Ismail Amin seorang akademisi/pengamat politik, berikut ini.

> "… media Barat cenderung membingkai penolakan Iran sebagai keras kepala, eskalatif, atau ancaman terhadap pelayaran global. Sementara media Iran membingkainya sebagai penolakan terhadap gencatan senjata yang tidak adil, karena menurut Iran, gencatan senjata tidak boleh hanya menghentikan respons Iran, tetapi membiarkan blokade, ancaman, dan agresi tetap berjalan …".

Terkait filter kepemilikan (*Ownership*), perwakilan dari Kedubes Iran yang tidak berkenan disebutkan namanya (Mr.NN), menyampaikan berikut ini.

> "… media dijalankan dengan adil di Iran meskipun ada sejumlah media yang melaporkan informasi yang bertentangan dengan posisi pemerintah. Adil untuk melihat dan mengakui perbedaan ini …".

Informan menyatakan bahwa media resmi Iran dipengaruhi kepentingan negara, ideologi anti-imperialisme, dan posisi strategis Republik Islam. Sebaliknya, media Barat banyak menggunakan kerangka kepentingan strategis negara-negara Barat, termasuk relasi Amerika dengan Israel dan kepentingan strategis di kawasan Teluk. Temuan ini menunjukkan bahwa ownership dalam konteks penelitian tidak cukup dipahami sebagai pertanyaan "siapa pemilik medianya", tetapi sebagai pertanyaan lebih luas mengenai siapa yang memiliki kapasitas struktural untuk menentukan orientasi produksi informasi.

Menanggapi filter *Ownership*, ditambahkan oleh staff KBRI Abudhabi bernama Jun Kuncoro, berikut ini.

> "… *ownership* media Iran berbeda dengan Barat yang penuh dengan Market of Ideas. Kalau negara Iran relatif sentralisasinya ke batin, ke agama gitu sehingga, lebih bisa dijaga sentralitas ideasnya, dan makin mudah dieksekusi …".

Propaganda Model dapat digunakan untuk memahami mengapa satu peristiwa politik yang sama dapat menghasilkan representasi media yang berbeda. Pernyataan Ismail Amin mengenai media Iran dan media Barat menunjukkan bahwa perbedaan tersebut terutama terlihat pada *framing*. Media Barat cenderung menempatkan penolakan Iran dalam kerangka eskalasi, ancaman, dan gangguan terhadap keamanan global, sedangkan media Iran mengonstruksikannya sebagai respons terhadap gencatan senjata yang dipandang tidak adil. Dengan demikian, yang berbeda bukan hanya informasi yang disampaikan, tetapi kerangka interpretatif yang digunakan untuk menentukan makna suatu peristiwa.

Dalam perspektif Herman dan Chomsky, kondisi tersebut dapat dipahami melalui mekanisme *filtering*. Informasi mengenai penolakan gencatan senjata tidak secara otomatis hadir kepada publik dalam bentuk realitas yang utuh, tetapi melewati struktur seleksi yang menentukan fakta mana yang dianggap penting, sumber mana yang dianggap kredibel, dan perspektif mana yang memperoleh ruang lebih besar. Dengan demikian, media memiliki peran dalam membentuk agenda interpretasi terhadap konflik. Peristiwa penolakan gencatan senjata, dapat diposisikan sebagai "keras kepala dan eskalatif" atau sebagai "penolakan terhadap gencatan senjata yang tidak adil", tergantung pada kerangka produksi informasi yang digunakan.

Namun demikian, terdapat temuan yang perlu diperhatikan secara kritis. Pernyataan Mr. NN bahwa terdapat media di Iran yang melaporkan informasi yang bertentangan dengan posisi pemerintah menunjukkan bahwa ekosistem media Iran tidak sepenuhnya homogen. Artinya, penelitian tidak seharusnya menyimpulkan secara simplistis bahwa seluruh media Iran merupakan instrumen langsung negara. Justru data tersebut menunjukkan adanya variasi internal dalam ekosistem media Iran. Temuan ini konsisten dengan prinsip penting Propaganda Model, dimana model tersebut tidak mensyaratkan adanya perintah langsung dari pemerintah kepada media untuk menghasilkan keseragaman pemberitaan. Yang lebih penting adalah bagaimana struktur kelembagaan dan lingkungan politik-ekonomi menciptakan kecenderungan tertentu dalam produksi informasi.

Dengan demikian, filter *ownership* dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai kapasitas struktural daripada sekadar kepemilikan formal. Pemilik atau pengendali institusi media memiliki kemampuan tertentu dalam menentukan sumber daya, orientasi editorial, akses terhadap informasi, dan batas-batas produksi berita. Namun, kapasitas struktural tersebut juga beroperasi melalui lingkungan politik dan ekonomi yang lebih luas. Karena itu, ketika informan menyatakan bahwa media Iran memiliki tingkat sentralisasi ide yang lebih kuat, sementara media Barat lebih banyak menggunakan prinsip *market of ideas*, pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mekanisme struktural dalam proses produksi informasi.

Pada titik ini, pernyataan Jun Kuncoro mengenai "sentralisasi ide" menjadi menarik untuk dibaca melalui Propaganda Model. Jika dalam sistem media tertentu terdapat konsentrasi orientasi ideologis yang lebih kuat, maka proses seleksi dan distribusi informasi dapat berlangsung lebih terarah karena terdapat kerangka ideologis yang relatif dominan. Dalam konteks Iran, ideologi negara dan narasi anti-imperialisme dapat menjadi kerangka yang memengaruhi bagaimana konflik dengan Amerika Serikat dan Israel dipresentasikan. Sementara itu, dalam konteks media Barat, proses tersebut dapat berlangsung melalui hubungan yang lebih kompleks antara kepemilikan media, pasar, sumber informasi, kepentingan politik, serta hubungan media dengan institusi negara.

2. Filter *Advertising*

Pada filter kedua ini, data penelitian memberikan temuan yang lebih terbatas dan karena itu perlu ditulis secara hati-hati. Informan dari pihak Iran menyatakan bahwa aktivitas media tetap berjalan meskipun terdapat sanksi dan tidak terdapat dampak besar terhadap sistem periklanan. Disampaikan oleh perwakilan dari Kedubes Iran yang tidak berkenan disebutkan namanya (Mr.NN), menyampaikan berikut ini.

> "… Iran menjalankan media seperti biasa, tidak ada dampak besar, meskipun ada sanksi yang dikenakan pada Iran. Narasi disesuaikan dengan realitas di lapangan …".

Menanggapi filter *Advertising*, ditambahkan oleh staff KBRI Abudhabi bernama Jun Kuncoro, berikut ini.

> "… it doesn work di dalam sistemnya Iran. Tetapi dia lebih kepada bagaimana tetap relevan di dalam penyajian. Informasinya mungkin lebih bukan kepada pengiklan, tapi bagaimana media tersebut bisa mempunyai karismatik. Dan ini agak beda dengan konteks negara barat, dimana karismatik tercipta dari media. Kalau di negara Iran ini, sudah melekat ke dalam orangnya …".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, temuan penelitian menunjukkan bahwa filter *advertising* tidak memperlihatkan mekanisme yang sama kuatnya sebagaimana yang digambarkan Herman dan Chomsky dalam konteks sistem media komersial. Informan Iran menyatakan bahwa media tetap beroperasi meskipun terdapat sanksi dan tidak terdapat dampak besar terhadap sistem periklanan. Sementara itu, informan dari pihak Indonesia secara lebih eksplisit

menyatakan bahwa mekanisme *advertising* "tidak bekerja" dalam sistem Iran. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa penerapan Propaganda Model harus mempertimbangkan konteks institusional dan ekonomi dari sistem media yang sedang dianalisis.

Dalam formulasi Herman dan Chomsky, *advertising* menjadi filter karena media dalam sistem komersial membutuhkan pendapatan iklan untuk mempertahankan keberlangsungan ekonominya. Ketergantungan tersebut menciptakan hubungan antara media dan pengiklan yang pada akhirnya dapat memengaruhi jenis konten yang diproduksi dan khalayak yang dianggap bernilai. Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan semacam itu tidak tampak menjadi mekanisme utama yang menjelaskan produksi pesan politik mengenai penolakan gencatan senjata di Iran. Dengan kata lain, data empiris tidak memberikan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pengiklan merupakan aktor utama yang menyaring atau menentukan narasi media Iran mengenai konflik.

Pernyataan Mr. NN bahwa "Iran menjalankan media seperti biasa" meskipun terdapat sanksi juga menunjukkan bahwa sanksi ekonomi dan mekanisme periklanan tidak secara otomatis menghasilkan konsekuensi yang sama terhadap produksi media. Dalam konteks ini, keberlangsungan media dapat dipengaruhi oleh struktur pendanaan dan hubungan kelembagaan yang berbeda dari model media komersial yang sangat bergantung pada pasar iklan. Oleh karena itu, apabila data penelitian tidak menemukan bukti mengenai tekanan pengiklan terhadap pemberitaan, kondisi tersebut dapat dinyatakan sebagai temuan empiris, bukan dipaksakan sebagai pembuktian terhadap keberadaan filter *advertising*.

Sementara itu, pernyataan Jun Kuncoro memberikan perspektif yang lebih menarik mengenai sumber daya simbolik yang membuat suatu media atau pesan tetap relevan. Ketika ia menyatakan bahwa mekanisme *advertising* "tidak bekerja" dan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana media tetap relevan serta memiliki karisma, terlihat adanya kemungkinan mekanisme legitimasi yang berbeda dari sistem media komersial. Daya pengaruh media tidak semata-mata dibangun melalui kekuatan ekonomi atau daya tarik bagi pengiklan, tetapi melalui kredibilitas, otoritas, identitas, dan figur yang membawa pesan tersebut.

Pernyataan bahwa karisma dalam konteks Iran "sudah melekat ke dalam orangnya" juga memperlihatkan adanya hubungan antara media, komunikator, dan legitimasi simbolik. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan hasil wawancara sebelumnya mengenai penggunaan figur Ayatollah sebagai *communication hook*. Artinya, daya persuasi komunikasi politik Iran tidak selalu bergantung pada kapasitas media sebagai institusi komersial, tetapi dapat bertumpu pada kredibilitas dan karisma figur politik atau keagamaan yang menjadi sumber pesan. Dalam konteks tersebut, otoritas komunikator dapat menjadi sumber daya komunikasi yang menggantikan sebagian fungsi daya tarik komersial media.

Temuan tersebut sekaligus memberikan nuansa penting terhadap penggunaan Propaganda Model. Model Herman dan Chomsky tidak seharusnya dipahami sebagai seperangkat filter yang harus selalu muncul dengan kekuatan

yang sama dalam setiap sistem media. Sebaliknya, model tersebut dapat digunakan sebagai alat analisis kritis untuk mengidentifikasi mekanisme struktural yang menyaring informasi dalam konteks tertentu. Apabila suatu filter tidak terbukti bekerja secara dominan, ketiadaan atau lemahnya filter tersebut justru merupakan temuan yang perlu dijelaskan.

3. Filter *Sourcing*

Pada filter ketiga, *sourcing*, penelitian justru menemukan mekanisme yang sangat kuat. Media Iran menggunakan sumber resmi negara, militer, kementerian, dan jaringan kawasan. Sementara media Barat lebih banyak menggunakan Gedung Putih, Pentagon, pejabat Israel, serta think tank Barat. Disampaikan Ismail Amin seorang akademisi/pengamat politik, berikut ini.

> "… dalam model propaganda, sumber informasi juga penting. Media Iran banyak memakai sumber resmi negara Iran, militer, kementerian, dan jaringan kawasan. Media Barat banyak memakai sumber Gedung Putih, Pentagon, pejabat Israel, atau think tank Barat. Maka hasil *framing*-nya berbeda …".

Terkait filter Sumber (*Sourcing*), perwakilan dari Kedubes Iran yang tidak berkenan disebutkan namanya (Mr.NN), menyampaikan berikut ini.

> "… Sumber informasi berasal dari semua informasi yang tersedia dan dapat dipercaya …".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, *sourcing* dapat dipandang sebagai salah satu filter yang paling relevan dalam menjelaskan perbedaan konstruksi media mengenai penolakan gencatan senjata Iran. Pernyataan Ismail Amin memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup jelas dalam ekosistem sumber informasi. Media Iran memperoleh informasi terutama dari institusi negara Iran, militer, kementerian, dan jaringan kawasan, sedangkan media Barat lebih banyak menggunakan sumber dari Gedung Putih, Pentagon, pejabat Israel, serta *think tank* Barat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya memilih fakta, tetapi juga memilih otoritas yang diberi kesempatan untuk menjelaskan dan mendefinisikan fakta tersebut.

Dalam kerangka Herman dan Chomsky, kondisi tersebut merupakan inti dari mekanisme *sourcing*. Media membutuhkan sumber yang dapat menyediakan informasi secara cepat, berkelanjutan, memiliki otoritas, dan relatif mudah diakses. Dalam situasi konflik, kebutuhan tersebut menjadi semakin besar karena jurnalis menghadapi keterbatasan akses terhadap lokasi kejadian, informasi militer, serta data operasional yang bersifat sensitif. Akibatnya, lembaga-lembaga negara, militer, pejabat pemerintah, dan institusi yang memiliki sumber daya informasi memperoleh posisi strategis sebagai pemasok informasi bagi media.

Dengan mekanisme tersebut menghasilkan perbedaan epistemik antara media Iran dan media Barat. Ketika media Iran lebih banyak menggunakan sumber yang berasal dari struktur negara Iran, maka perspektif Iran memperoleh posisi yang lebih kuat dalam menjelaskan peristiwa. Sebaliknya, ketika media Barat lebih banyak menggunakan sumber Gedung Putih, Pentagon, pejabat Israel, dan think tank Barat, maka perspektif aktor-aktor tersebut memperoleh legitimasi sebagai sumber pengetahuan mengenai konflik. Dengan demikian,

sourcing tidak hanya menentukan "dari mana berita diperoleh", tetapi juga berpengaruh terhadap siapa yang memperoleh otoritas untuk menentukan apa yang dianggap sebagai fakta.

Pernyataan Mr. NN bahwa sumber informasi berasal dari "semua informasi yang tersedia dan dapat dipercaya" memperlihatkan adanya klaim bahwa proses pemilihan sumber didasarkan pada prinsip kredibilitas dan ketersediaan informasi. Pernyataan tersebut penting untuk dicatat karena menunjukkan perspektif normatif dari pihak Iran, yaitu bahwa sumber yang digunakan tidak semata-mata dibatasi pada sumber pemerintah. Namun, dalam pembacaan kritis, konsep "dapat dipercaya" sendiri merupakan kategori yang tidak sepenuhnya netral. Suatu sumber dianggap kredibel karena memiliki reputasi, otoritas, akses informasi, atau pengakuan institusional tertentu. Dengan demikian, pertanyaan kritisnya bukan hanya "apakah sumber tersebut dapat dipercaya?", tetapi juga siapa yang menentukan bahwa sumber tersebut layak dipercaya dan berdasarkan standar apa. Pada titik ini, *sourcing* memperlihatkan hubungan yang erat dengan konstruksi realitas politik. Sumber resmi negara memiliki kapasitas untuk memberikan narasi mengenai alasan suatu kebijakan diambil, sementara media kemudian memiliki kapasitas untuk mendistribusikan narasi tersebut kepada publik. Apabila sumber-sumber alternatif tidak memiliki akses yang sama terhadap media, maka perspektif mereka memiliki peluang lebih kecil untuk menjadi bagian dari konstruksi berita. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam distribusi otoritas epistemik, yaitu ketimpangan mengenai siapa yang memiliki kesempatan untuk berbicara dan siapa yang memiliki kesempatan lebih besar untuk dipercaya.

Hal tersebut terlihat jelas dalam konteks penolakan gencatan senjata. Jika media Iran memperoleh informasi terutama dari pemerintah, militer, dan kementerian Iran, maka alasan penolakan gencatan senjata akan lebih mudah dikonstruksikan berdasarkan perspektif Iran, misalnya sebagai tindakan mempertahankan kedaulatan atau menolak gencatan senjata yang dianggap tidak adil. Sebaliknya, ketika media Barat lebih banyak menggunakan sumber Gedung Putih, Pentagon, pejabat Israel, atau *think tank* Barat, penolakan yang sama dapat memperoleh interpretasi berbeda, misalnya sebagai tindakan eskalatif, keras kepala, atau ancaman terhadap keamanan regional dan internasional.

Dengan demikian, perbedaan *sourcing* menghasilkan perbedaan *framing*. Temuan ini menghubungkan secara langsung filter ketiga Herman dan Chomsky dengan temuan penelitian sebelumnya mengenai *reframing*. *Sourcing* dapat dipandang sebagai salah satu tahap struktural yang memungkinkan *framing* tertentu menjadi lebih dominan. Sederhananya, sumber menentukan perspektif yang tersedia; perspektif memengaruhi *framing*; *framing* memengaruhi cara publik memahami peristiwa; dan pemaknaan tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap legitimasi atau delegitimasi suatu tindakan politik.

Dalam konteks ini, ketergantungan media terhadap sumber institusional juga memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam komunikasi politik tidak hanya terletak pada kemampuan berbicara, tetapi juga pada kemampuan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh media. Pemerintah, militer, dan institusi

strategis memiliki keunggulan struktural karena mereka menguasai informasi yang sulit diperoleh dari sumber lain. Mereka bukan hanya menjadi objek pemberitaan, tetapi juga dapat menjadi pemasok utama bahan pemberitaan. Posisi tersebut memberikan mereka peluang lebih besar untuk memengaruhi agenda dan konstruksi informasi.

2. Filter *Flak*

Pada filter keempat, flak, data menunjukkan adanya tekanan politik dan diplomatik yang bekerja terhadap narasi. Disampaikan Ismail Amin seorang akademisi/pengamat politik, berikut ini.

> "… media resmi Iran tentu dipengaruhi oleh kepentingan negara, ideologi anti-imperialisme, dan posisi strategis Republik Islam. Karena itu, istilah yang digunakan adalah agresi, perlawanan, kedaulatan, hak membela diri, dan penolakan terhadap dikte Amerika. Sebaliknya, media Barat sering menggunakan istilah seperti "Iran menolak gencatan senjata", "Iran mengancam Hormuz", atau "Iran mengganggu pelayaran". Pilihan istilah ini bukan netral. Ia mencerminkan sudut pandang politik …".

Terkait filter *Flak*, perwakilan dari Kedubes Iran yang tidak berkenan disebutkan namanya (Mr.NN), menyampaikan berikut ini.

> "… Iran tetap teguh pada kebijakan penolakan gencatan senjata karena untuk membela diri dari pelanggaran diplomasi/negosiasi oleh AS …".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa *flak* dalam konteks komunikasi politik Iran bekerja melalui kontestasi, tekanan, dan pendisiplinan narasi. Pernyataan Ismail Amin memperlihatkan bahwa perbedaan penggunaan istilah antara media Iran dan media Barat bukan sekadar variasi bahasa, melainkan merupakan bagian dari proses konstruksi politik terhadap realitas konflik. Istilah seperti "agresi", "perlawanan", "kedaulatan", dan "hak membela diri" memberikan legitimasi terhadap tindakan Iran, sementara istilah seperti "menolak gencatan senjata", "mengancam Hormuz", atau "mengganggu pelayaran" cenderung menempatkan Iran dalam posisi yang lebih problematik di hadapan publik. Dengan demikian, bahasa menjadi salah satu arena penting dalam perebutan legitimasi politik. Setiap istilah membawa asumsi tertentu mengenai aktor, tindakan, sebab, dan akibat. Ketika tindakan Iran disebut sebagai "perlawanan", maka terdapat asumsi bahwa Iran merupakan pihak yang merespons suatu ancaman. Sebaliknya, ketika tindakan yang sama disebut sebagai "ancaman" atau "gangguan", maka Iran ditempatkan sebagai sumber persoalan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *flak* tidak hanya dapat dipahami sebagai tekanan dalam bentuk formal, tetapi juga sebagai upaya untuk mendisiplinkan cara publik memahami suatu tindakan politik melalui konstruksi bahasa dan narasi.

Dalam perspektif Herman dan Chomsky, *flak* memiliki fungsi dalam menciptakan tekanan terhadap media atau komunikator yang menyampaikan perspektif tertentu. Tekanan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kritik, kecaman, tuduhan, hingga tekanan politik dan institusional. Dalam konteks penelitian ini, karakter konflik internasional membuat mekanisme tersebut menjadi lebih kompleks karena tekanan tidak hanya

berlangsung antara media dan institusi politik dalam satu negara, tetapi juga melintasi batas negara dan melibatkan aktor-aktor geopolitik.

Temuan dari wawancara dengan Mr. NN memperlihatkan bentuk yang menarik dari mekanisme tersebut. Pernyataan bahwa Iran tetap teguh menolak gencatan senjata karena adanya "pelanggaran diplomasi/negosiasi oleh AS" menunjukkan bahwa tekanan yang datang dari pihak luar tidak menghasilkan perubahan kebijakan sebagaimana yang diharapkan oleh pihak yang memberikan tekanan. Sebaliknya, tekanan tersebut direinterpretasikan sebagai pembenaran bagi kebijakan Iran. Dengan kata lain, sesuatu yang oleh pihak eksternal mungkin dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengubah perilaku Iran justru dikonstruksikan oleh Iran sebagai bukti bahwa kebijakan mempertahankan diri harus diteruskan.

3. Filter Ideologi

Pada filter kelima, ideologi dominan, temuan penelitian merupakan salah satu temuan paling kuat. Iran menggunakan kosakata seperti "agresi", "perlawanan", "kedaulatan", "hak membela diri", dan "penolakan terhadap dikte Amerika", sedangkan media Barat menggunakan istilah seperti "Iran menolak gencatan senjata", "Iran mengancam Hormuz", atau "Iran mengganggu pelayaran". Perbedaan pilihan leksikal tersebut memperlihatkan bahwa realitas konflik tidak hanya dipertukarkan melalui fakta, tetapi melalui *regime of meaning* yang menentukan siapa korban, siapa agresor, siapa pembela, dan siapa penghambat perdamaian. Disampaikan Ismail Amin seorang akademisi/pengamat politik, berikut ini.

> "… narasi Iran dapat diringkas dalam beberapa poin. Pertama, Iran tidak menolak perdamaian, tetapi menolak gencatan senjata yang dipaksakan. Kedua, Iran menilai Amerika dan Israel adalah pihak agresor, sehingga beban pertama untuk menghentikan perang berada pada pihak yang memulai serangan. Ketiga, Iran menolak perundingan atau gencatan senjata yang hanya memberi waktu bagi Amerika untuk menyusun tekanan baru. Keempat, Iran menegaskan bahwa keamanan Selat Hormuz dan kawasan hanya bisa terjamin jika kedaulatan Iran dihormati …".

Terkait filter Ideologi, perwakilan dari Kedubes Iran yang tidak berkenan disebutkan namanya (Mr.NN), menyampaikan berikut ini.

> "… Iran menganggap AS sebagai pihak yang melanggar, bahwa mereka menentang diplomasi yang membenarkan kebijakan Iran termasuk selama konflik ini …".

Dalam konteks ini, konsep Manufacturing Consent menjadi penting. Herman dan Chomsky menjelaskan bahwa sistem propaganda bekerja dengan mempersempit rentang informasi yang tersedia sehingga sebagian narasi menjadi lebih mudah masuk ke ruang publik, sementara narasi lain dimarginalkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung secara kompetitif. Iran berusaha melakukan *counter manufacturing consent* melalui produksi kontra narasi. Dengan kata lain, Iran tidak hanya menjadi objek representasi media internasional, tetapi berusaha menjadi produsen aktif atas representasi dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa ideologi merupakan filter yang memberikan kerangka interpretatif terhadap seluruh pesan komunikasi politik Iran mengenai penolakan gencatan senjata. Jika pada filter *sourcing* persoalannya adalah siapa yang memperoleh kesempatan untuk mendefinisikan realitas, maka pada filter ideologi persoalannya bergeser menjadi dalam kerangka nilai apa realitas tersebut harus dipahami.

Proses Konstruksi Legitimasi Iran

Temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa komunikasi politik Iran dalam menolak gencatan senjata tidak dapat dilepaskan dari konstruksi diskursus politik luar negeri yang lebih luas. Penolakan terhadap gencatan senjata tidak disampaikan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, melainkan ditempatkan dalam kerangka kedaulatan negara, perlawanan terhadap hegemoni, hak membela diri, dan konsepsi mengenai perdamaian yang adil. Melalui kerangka tersebut, Iran berupaya mengubah pemaknaan atas posisi politiknya. Gencatan senjata yang dipandang menguntungkan pihak yang dianggap sebagai agresor dikonstruksikan bukan sebagai jalan menuju perdamaian, tetapi sebagai bentuk tekanan yang berpotensi mempertahankan ketimpangan kekuasaan. Sebaliknya, penolakan terhadap gencatan senjata dipresentasikan sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan dan menciptakan kondisi bagi perdamaian yang lebih substantif. Konstruksi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ismail Amin, akademisi/pengamat politik, sebagai berikut.

> "… diskursus politik luar negeri Iran dibangun di atas kerangka kedaulatan, perlawanan terhadap hegemoni, dan hak membela diri. Iran tidak membingkai penolakannya sebagai penolakan terhadap perdamaian, tetapi sebagai penolakan terhadap gencatan senjata yang dipaksakan, tidak adil, dan hanya menguntungkan pihak agresor. Dalam konstruksi ini, Iran ingin menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak boleh lahir dari tekanan militer Amerika-Israel, tetapi dari penghormatan terhadap kedaulatan dan penghentian agresi secara menyeluruh …".

Pernyataan Ismail Amin menunjukkan bahwa komunikasi politik Iran bekerja melalui transformasi makna politik. Penolakan terhadap gencatan senjata tidak dibiarkan dipersepsikan sebagai tindakan anti perdamaian, tetapi direkonstruksi sebagai tindakan pro kedaulatan, pro keadilan, dan pro perdamaian. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak hanya menyampaikan apa yang dilakukan negara, tetapi juga berupaya menentukan bagaimana tindakan tersebut harus dimaknai. Transformasi tersebut berlangsung melalui *political reframing*, yakni dengan menempatkan penolakan gencatan senjata dalam kerangka *sovereignty, resistance*, *self defense*, dan *just peace*. Dengan demikian, tindakan yang semula dapat dipersepsikan negatif memperoleh makna legitimatif melalui perubahan kerangka interpretasi.

Kedaulatan menjadi salah satu sumber utama legitimasi tersebut. Penolakan gencatan senjata dikonstruksikan sebagai hak negara berdaulat untuk menentukan keputusan politiknya tanpa paksaan eksternal. Dalam perspektif Political Legitimacy Theory, konstruksi ini berfungsi membangun *belief in legitimacy*, karena keputusan pemerintah tidak hanya dipahami sebagai

penggunaan kekuasaan, tetapi sebagai tindakan yang memiliki dasar pembenaran normatif. Konstruksi tersebut diperkuat melalui narasi perlawanan terhadap hegemoni. Iran memosisikan dirinya sebagai aktor yang mempertahankan otonomi, sementara Amerika direpresentasikan sebagai kekuatan dominan yang memberikan tekanan. Karena itu, gencatan senjata yang dianggap "dipaksakan" dilakukan *reframing* sebagai persoalan ketimpangan kekuasaan. Jika narasi dominan menempatkan Iran sebagai penghambat perdamaian, *counter narrative* Iran justru menempatkan tekanan eksternal sebagai hambatan terhadap perdamaian yang adil.

Hal penting lainnya adalah pembedaan antara perdamaian dan gencatan senjata. Iran tidak mengonstruksikan dirinya sebagai penolak perdamaian, melainkan membedakan penghentian sementara kekerasan (*ceasefire*) dari perdamaian yang didasarkan pada kedaulatan dan keadilan. Dengan demikian, "menolak gencatan senjata" tidak identik dengan "menolak perdamaian". *Reframing* ini memberikan ruang argumentatif bagi Iran untuk mempertahankan penolakannya tanpa menerima label sebagai aktor anti perdamaian. Narasi tersebut kemudian diperkuat melalui hak membela diri (*self defense*), yang menggeser posisi Iran dari *potential aggressor* menjadi *defending actor*. Pilihan istilah seperti agresi, perlawanan, kedaulatan, dan *self defense* bukan sekadar persoalan linguistik, tetapi merupakan bagian dari perebutan legitimasi, karena menentukan siapa yang diposisikan sebagai pelaku agresi dan siapa yang memiliki hak untuk bertindak.

Melalui Propaganda Model Herman dan Chomsky, temuan ini menunjukkan bahwa konflik juga merupakan kompetisi *framing*. Ekosistem komunikasi Iran dan Barat dapat mengorganisasi fakta yang sama ke dalam kerangka interpretasi berbeda. Istilah seperti agresi dan perlawanan dapat menghasilkan makna yang berbeda dari istilah eskalasi, ancaman, atau penolakan gencatan senjata. Hal ini memperlihatkan pentingnya *sourcing* dan *ideology* dalam menentukan bagaimana realitas politik direpresentasikan. Dalam konteks tersebut, Iran tidak hanya melakukan *counter propaganda*, tetapi juga *counter manufacturing consent*. Iran berusaha membangun penerimaan terhadap kerangka bahwa dirinya merupakan pihak yang mempertahankan diri, bahwa tekanan eksternal merupakan bentuk agresi, bahwa gencatan senjata yang dipaksakan bukanlah perdamaian, dan bahwa mempertahankan kedaulatan merupakan hak negara. Dengan demikian, *consent* yang diproduksi bukan sekadar persetujuan terhadap suatu kebijakan, tetapi penerimaan terhadap kerangka interpretasi yang membuat kebijakan tersebut tampak rasional dan sah.

Dalam perspektif Political Legitimacy Theory, keseluruhan konstruksi tersebut diarahkan pada pembentukan *belief in legitimacy*. Legitimasi dibangun melalui beberapa lapisan, yakni kedaulatan memberikan hak untuk menentukan keputusan; *self defense* memberikan pembenaran normatif untuk bertindak; anti hegemoni memberikan makna perjuangan terhadap tekanan eksternal; dan *just peace* mengubah penolakan gencatan senjata menjadi bagian dari perjuangan menuju perdamaian yang dianggap lebih adil. Karena komunikasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada publik domestik, tetapi juga kepada publik regional dan

internasional, proses ini dapat dipahami sebagai *legitimacy projection*, yaitu proyeksi keabsahan posisi negara ke dalam ruang komunikasi internasional. Pada tingkat domestik, narasi berfungsi mempertahankan solidaritas; pada tingkat regional, membangun resonansi dengan kelompok atau negara yang memiliki sentimen anti-hegemoni. Sedangkan pada tingkat internasional, menantang representasi Iran sebagai negara penghambat perdamaian.

Dengan demikian, temuan dari hasil wawancara Ismail Amin menunjukkan bahwa komunikasi politik Iran dalam penolakan gencatan senjata pada dasarnya merupakan proses *reframing* untuk mengubah makna tindakan sekaligus memproduksi legitimasi. Propaganda Model membantu menjelaskan bagaimana perebutan makna berlangsung melalui kontestasi *framing* dan produksi informasi, sementara Political Legitimacy Theory menjelaskan mengapa perebutan makna tersebut penting, yakni untuk membentuk keyakinan bahwa tindakan Iran memiliki dasar yang sah. Pada titik inilah penolakan gencatan senjata dikonstruksikan bukan sebagai penolakan terhadap perdamaian, melainkan sebagai tindakan berdaulat untuk mempertahankan diri dan memperjuangkan perdamaian yang dianggap adil.

1. Konstruksi Legitimasi Domestik

Terkait konstruksi legitimasi domestik, perwakilan dari Kedubes Iran yang tidak berkenan disebutkan namanya (Mr.NN), menyampaikan berikut ini.

> "… Iran tetap teguh pada keyakinan bahwa Amerika Serikat yang melanggar mekanisme diplomasi atau non-kekerasan …".

Pernyataan Mr. NN menunjukkan bahwa komunikasi politik Iran membangun legitimasi domestik melalui konstruksi sebab-akibat atas konflik. Penolakan terhadap gencatan senjata tidak diposisikan sebagai keputusan sepihak, tetapi sebagai konsekuensi dari tindakan Amerika Serikat yang diklaim melanggar mekanisme diplomasi dan prinsip non kekerasan. Dengan demikian, konstruksi komunikasinya bergerak dari "Iran menolak gencatan senjata" menjadi "Iran merespons pelanggaran diplomasi". Dalam perspektif Political Legitimacy Theory, konstruksi kausal tersebut berfungsi membangun *belief in legitimacy*, karena publik diarahkan untuk melihat bahwa kebijakan pemerintah memiliki alasan yang dapat dibenarkan. Legitimasi tidak hanya dibangun melalui klaim bahwa Iran benar, tetapi juga melalui moral *positioning* yang menempatkan Amerika Serikat sebagai pihak yang dianggap memicu atau melanggar mekanisme diplomasi, sementara Iran diposisikan sebagai pihak yang merespons dan mempertahankan diri.

Dalam perspektif komunikasi politik McNair, proses tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak berhenti pada penyampaian kebijakan, tetapi juga memproduksi konteks dan argumentasi yang memungkinkan kebijakan memperoleh penerimaan. Sementara itu, Propaganda Model Herman dan Chomsky membantu menjelaskan bahwa yang diperebutkan bukan hanya fakta, melainkan otoritas untuk menentukan interpretasi atas fakta. Siapa yang diposisikan sebagai pemicu konflik akan memengaruhi apakah tindakan Iran dipahami sebagai agresi atau respons *defensif* .

Pada tingkat domestik, konstruksi tersebut juga berfungsi membangun batas simbolik "kita" dan "mereka". Iran sebagai negara yang mempertahankan

kedaulatan dan Amerika Serikat sebagai kekuatan eksternal yang dianggap memberikan tekanan. Namun, pernyataan Mr. NN tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seluruh masyarakat Iran menerima konstruksi tersebut. Data ini lebih tepat menunjukkan mekanisme komunikasi yang digunakan untuk memproduksi pembenaran dan mengupayakan legitimasi, sedangkan keberhasilan pembentukan *belief in legitimacy* memerlukan bukti dari respons dan penerimaan audiens. Dengan demikian, temuan Mr. NN memperlihatkan bahwa legitimasi domestik Iran dikonstruksikan melalui pembenaran kausal dan moral. Penolakan gencatan senjata di-*reframing* sebagai respons terhadap pelanggaran diplomasi dan tekanan eksternal, sehingga dapat dipahami sebagai tindakan yang rasional, *defensif* , dan sah. Pada titik ini, komunikasi politik, *counter narrative*, dan legitimasi politik bertemu dalam satu proses, yakni perebutan narasi mengenai siapa yang melanggar diplomasi menjadi sekaligus perebutan legitimasi atas tindakan politik Iran.

2. Konstruksi Legitimasi Internasional

Terkait konstruksi legitimasi internasional, perwakilan dari Kedubes Iran yang tidak berkenan disebutkan namanya (Mr.NN), menyampaikan berikut ini.

> "… Iran berpegang pada Piagam PBB khususnya mengenai hak untuk membela diri terhadap setiap agresi …".

Pernyataan Mr. NN menunjukkan bahwa Iran berupaya membangun legitimasi internasional melalui legitimasi normatif, dengan menempatkan tindakannya dalam kerangka hak membela diri, kedaulatan, dan hukum internasional seperti yang tertuang di dalam Piagam PBB. Dengan strategi *normative framing* tersebut, konflik tidak semata dipresentasikan sebagai persoalan militer atau kepentingan nasional, tetapi sebagai persoalan hak, norma, dan keabsahan tindakan negara. Proses tersebut menunjukkan *reframing*: "Iran melakukan perlawanan". Iran berusaha menggeser posisinya dari objek tuduhan menjadi subjek yang mengajukan klaim hukum dan normatif.

Penggunaan Piagam PBB menjadi penting karena menyediakan bahasa universal yang dapat dipertukarkan dalam arena diplomasi internasional. Kepentingan politik Iran untuk mempertahankan diri diterjemahkan ke dalam bahasa *self defense*, *sovereignty*, *aggression*, dan *international law*. Perubahan dari klaim "memiliki kepentingan" menjadi "memiliki hak" memberikan dasar normatif yang lebih kuat bagi pembenaran tindakan negara. Dalam perspektif Political Legitimacy Theory, konstruksi ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya diarahkan kepada masyarakat domestik, tetapi juga kepada komunitas internasional sebagai ruang evaluasi normatif. Jika legitimasi domestik dibangun melalui narasi kedaulatan, pembelaan diri, dan respons terhadap tekanan eksternal, maka legitimasi internasional diproyeksikan melalui klaim bahwa tindakan Iran memiliki dasar dalam norma hukum internasional. Dengan demikian, komunikasi Iran bekerja melalui dual *legitimacy construction*, yaitu membangun legitimasi ke dalam sekaligus memproyeksikannya ke luar.

Temuan ini juga relevan dengan Propaganda Model Herman dan Chomsky, terutama mengenai kontestasi sumber dan *framing*. Ketika media internasional membangun representasi tertentu mengenai Iran, Iran menghadirkan sumber legitimasi alternatif melalui hukum internasional, forum

diplomatik, dokumen, dan pernyataan resmi. Pertarungan tersebut bukan hanya mengenai siapa yang benar, tetapi juga mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kerangka normatif dalam menilai konflik. Namun, perlu dibedakan antara klaim legitimasi dan validitas hukum. Pernyataan informan bahwa Iran menggunakan Piagam PBB menunjukkan bagaimana Iran mengonstruksikan dan mengomunikasikan pembenaran tindakannya, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tindakan Iran secara hukum memenuhi persyaratan *self defense*. Karena itu, temuan penelitian ini lebih tepat digunakan untuk menjelaskan strategi komunikasi legitimasi, bukan untuk menetapkan benar atau salahnya klaim hukum Iran.

Dengan demikian, temuan Mr. NN memperlihatkan bahwa hukum internasional bagi Iran tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai bahasa dan sumber daya legitimasi politik. Pada tingkat domestik, penolakan gencatan senjata dikonstruksikan sebagai respons terhadap pelanggaran diplomasi. Sementara pada tingkat internasional, tindakan yang sama diposisikan sebagai pelaksanaan hak negara berdaulat untuk membela diri. Keduanya bertemu dalam satu konstruksi utama, yakni penolakan gencatan senjata bukan penolakan terhadap perdamaian, melainkan tindakan yang diklaim memiliki dasar politik, moral, dan normatif untuk mempertahankan kedaulatan Iran.

Pembahasan hasil analisis penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa keputusan Iran untuk menolak gencatan senjata dalam konflik Iran-Amerika periode Maret 2026 tidak semata-mata merupakan keputusan politik, militer, atau diplomatik, melainkan sekaligus merupakan tindakan komunikasi politik yang memiliki tujuan strategis. Dalam perspektif Nimmo dan McNair, komunikasi politik tidak berhenti pada aktivitas penyampaian informasi mengenai politik, tetapi merupakan proses komunikatif yang memiliki tujuan tertentu dan berpotensi menghasilkan konsekuensi terhadap persepsi, sikap, perilaku, serta kebijakan publik. McNair secara khusus menempatkan komunikasi aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu sebagai bagian fundamental dari komunikasi politik. Dengan kerangka tersebut, penolakan Iran terhadap gencatan senjata dapat dipahami sebagai *political communication act*. Keputusan politik tersebut sekaligus mengirimkan sinyal mengenai posisi, kepentingan, batas toleransi, dan tuntutan Iran kepada publik domestik maupun aktor internasional.

Serangan terhadap wilayah dan fasilitas Iran, tekanan diplomatik, sanksi, persoalan keamanan regional, serta kompetisi narasi internasional menciptakan kebutuhan bagi Iran untuk menjelaskan dan membenarkan posisi politiknya. Dengan demikian, komunikasi tidak hadir setelah keputusan politik sebagai aktivitas tambahan, tetapi menjadi bagian integral dari proses mempertahankan keputusan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Iran membutuhkan komunikasi strategis untuk mempertahankan kedaulatan, membangun legitimasi domestik dan internasional, serta mempertahankan posisi tawarnya dalam diplomasi. Data penelitian juga menunjukkan bahwa penolakan terhadap gencatan senjata dikonstruksikan sebagai upaya mempertahankan posisi tawar

dan keamanan nasional, bukan semata-mata sebagai penolakan terhadap perdamaian.

Dari konteks tersebut kemudian muncul tahap kedua, yaitu produksi pesan politik. Pada tahap ini Iran melakukan konstruksi makna melalui narasi utama yang menekankan kedaulatan, hak membela diri, penolakan terhadap agresi, penolakan terhadap tekanan atau dikte Amerika, serta tuntutan terhadap jaminan keamanan. Karena itu, proposisi komunikatif yang dibangun Iran bukan "Iran menolak perdamaian", melainkan "Iran menolak gencatan senjata yang tidak menjamin keamanan dan kedaulatannya". Perubahan konstruksi semantik ini merupakan aspek penting dari strategi komunikasi Iran karena mengubah posisi yang secara literal dapat dibaca sebagai *rejection of ceasefire* menjadi narasi *defense of sovereignty*. Temuan wawancara memperlihatkan secara jelas bahwa Iran berusaha menggeser asosiasi penolakan dari "anti-damai" menjadi "pro kedaulatan".

Produksi pesan tersebut dilakukan melalui ekosistem komunikator dan saluran yang berlapis. Aktor politik utama, Kementerian Luar Negeri, IRGC, parlemen, media pemerintah, kanal diplomatik, media sosial, serta jaringan media kawasan berfungsi sebagai infrastruktur penyebaran pesan. Media resmi, komunikasi diplomatik melalui PBB dan mediator, pernyataan aktor keamanan, serta jaringan media sosial memungkinkan pesan yang sama diproduksi dalam berbagai bentuk sesuai dengan karakter audiens. Temuan penelitian menunjukkan penggunaan IRNA, Press TV, Tasnim, IRIB, situs kementerian, komunikasi diplomatik, pernyataan parlemen dan IRGC, serta akun pejabat dan jaringan media kawasan. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi Iran bersifat multi-aktor, multi-kanal, dan multi-audiens.

Tujuan penelitian adalah menganalisis upaya propaganda penolakan gencatan senjata berdasarkan lima filter Propaganda Model Herman dan Chomsky. Posisi teori ini dalam penelitian bukan untuk menyatakan bahwa Iran "memerintahkan media untuk berpropaganda", melainkan untuk menjelaskan bahwa pesan politik yang diproduksi negara memasuki lingkungan komunikasi yang telah memiliki struktur, kepentingan, sumber informasi, tekanan, dan ideologi tertentu. Herman dan Chomsky menjelaskan lima filter *ownership*, *advertising*, *sourcing*, *flak*, dan ideologi dominan, sebagai mekanisme struktural yang menyaring berita dan membatasi informasi yang sampai kepada publik. Berdasarkan hasil penelitian, kelima filter tidak bekerja secara identik pada konteks Iran. *Ownership*, *sourcing*, *flak*, dan ideologi dominan menunjukkan relevansi analitis yang kuat, sementara *advertising* memperlihatkan relevansi yang lebih terbatas berdasarkan data wawancara. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa Propaganda Model lebih produktif jika digunakan sebagai kerangka analisis struktural, bukan sebagai *template* yang mengharuskan setiap filter muncul dengan intensitas yang sama.

a. *Ownership* berkaitan dengan struktur penguasaan media dan orientasi politik-ekonomi yang memungkinkan kepentingan tertentu memengaruhi produksi informasi.
b. *Advertising* berkaitan dengan ketergantungan media komersial terhadap sumber pendanaan. Pada *advertising*, penelitian belum menemukan bukti

empiris yang cukup untuk menjadikannya faktor dominan dalam pembentukan narasi Iran.

c. *Sourcing* terlihat melalui ketergantungan media pada sumber-sumber resmi dan institusional. Pada filter *Sourcing*, merupakan filter yang paling jelas terlihat. Iran menggunakan sumber negara, militer, kementerian, dan jaringan kawasan, sedangkan media Barat mengandalkan sumber Gedung Putih, Pentagon, pejabat Israel, dan think tank Barat.
d. *Flak* bekerja melalui tekanan, kritik, ancaman, atau respons negatif terhadap narasi tertentu. Pada filter *Flak*, bekerja melalui tekanan dan respons negatif terhadap narasi yang berlawanan.
e. Sementara itu, ideologi dominan membentuk kerangka kategorisasi mengenai siapa yang dipersepsikan sebagai agresor, korban, pembela, ancaman, atau pihak yang bertanggung jawab atas konflik. Ideologi dominan terlihat melalui pembentukan oposisi biner agresi versus pertahanan, dikte versus kedaulatan, perang versus perdamaian palsu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa filter tersebut tidak hanya bekerja terhadap media Iran, tetapi juga terhadap media Barat. Media Iran menggunakan sumber resmi pemerintah, militer, dan jaringan kawasan, sedangkan media Barat lebih banyak menggunakan sumber seperti Gedung Putih, Pentagon, pejabat Israel, dan think tank Barat. Perbedaan sumber tersebut menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda. Dengan demikian, model ini memandang konflik komunikasi Iran-Amerika sebagai kontestasi dua atau lebih ekosistem produksi informasi, bukan sebagai hubungan sederhana antara "propaganda Iran" dan "publik internasional". Khusus *advertising*, data penelitian belum menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh yang sama kuat dengan *ownership*, *sourcing*, *flak*, dan ideologi dalam konteks media Iran. Karena itu, model tidak memaksakan asumsi bahwa kelima filter bekerja dengan bobot yang identik. Hal ini justru menjadi temuan penting karena Herman dan Chomsky menjelaskan bahwa *ownership* dan *advertising* secara khusus berhubungan dengan struktur institusional media korporasi, sementara *sourcing* dan *flak* memiliki jangkauan penerapan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Komunikasi Politik Luar Negeri Iran Melalui Strategi Legitimasi Penolakan Gencatan Senjata: Pendekatan Kritis Noam Chomsky pada Kasus Perang Iran Melawan Amerika Periode Maret–April 2026, menghasilkan kesimpulan bahwa, terkait dengan tujuan penelitian mengenai upaya propaganda berdasarkan lima filter Herman dan Chomsky, penelitian menemukan bahwa Propaganda Model memiliki relevansi kuat untuk menjelaskan bagaimana pesan mengenai penolakan gencatan senjata diproduksi, disaring, didistribusikan, dan dipertentangkan dalam lingkungan komunikasi Iran dan Barat. Namun, kelima filter tidak bekerja dengan kekuatan dan mekanisme yang sama dalam konteks Iran. *Ownership*, *sourcing*, *flak*, dan ideologi menunjukkan relevansi empiris yang lebih kuat, sedangkan filter *advertising* tidak ditemukan sebagai faktor dominan berdasarkan data penelitian. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa Propaganda Model tidak tepat diterapkan secara mekanistis sebagai model yang mengharuskan seluruh

filter bekerja secara identik. Sebaliknya, model tersebut lebih produktif digunakan sebagai perangkat kritis untuk membongkar struktur yang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap produksi informasi, siapa yang menjadi sumber informasi, narasi apa yang memperoleh visibilitas, dan perspektif mana yang cenderung dimarjinalkan. Dengan demikian, propaganda dalam penelitian ini tidak dipahami semata-mata sebagai instruksi langsung negara kepada media, tetapi sebagai proses produksi dan distribusi makna yang berlangsung dalam struktur komunikasi yang memiliki kepentingan politik, kelembagaan, ideologis, dan sumber informasi tertentu. Penelitian juga menemukan bahwa komunikasi Iran tidak berhenti pada reproduksi narasi resmi, tetapi berkembang menjadi *counter narrative* terhadap *framing* yang menempatkan Iran sebagai ancaman, agresor, pelanggar hukum internasional, atau penghambat perdamaian. Iran berusaha merebut kembali otoritas untuk mendefinisikan dirinya dan konflik melalui media resmi, diplomasi, forum internasional, media sosial, dan jaringan komunikasi alternatif. Dalam konteks digital, proses tersebut menghasilkan apa yang dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai *contested consent*, yaitu kondisi ketika produksi persetujuan tidak lagi sepenuhnya berlangsung secara satu arah, tetapi diperebutkan oleh negara dan aktor lain melalui berbagai ruang komunikasi. Dominasi suatu narasi tidak dengan sendirinya menunjukkan keseragaman keyakinan masyarakat. Dengan demikian, penelitian memberikan nuansa kritis terhadap Manufacturing Consent, bahwa pada lingkungan komunikasi digital, persoalan utama bukan hanya bagaimana *consent* diproduksi, tetapi juga bagaimana consent tersebut dipertentangkan, dinegosiasikan, dan dilawan melalui narasi alternatif.

Saran Penelitian

1. Mengembangkan penelitian komparatif; Penelitian berikutnya disarankan membandingkan strategi komunikasi legitimasi Iran dengan negara lain yang menghadapi konflik dan tekanan internasional. Perbandingan dapat dilakukan terhadap negara yang memiliki sistem media negara yang kuat maupun negara yang lebih bergantung pada media komersial. Perbandingan tersebut akan membantu menguji apakah model yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan karakteristik khusus Iran atau memiliki kemungkinan diterapkan pada konteks konflik internasional lainnya.
2. Memperluas konsep *contested consent*; Penelitian ini menemukan bahwa Manufacturing Consent dalam ruang digital tidak lagi cukup dipahami sebagai produksi persetujuan secara satu arah. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan konsep *contested consent*, yaitu proses ketika negara, media, masyarakat, dan aktor non-negara secara bersamaan memproduksi, menerima, menolak, dan menegosiasikan makna politik. Konsep ini dapat diuji dalam berbagai konflik kontemporer untuk melihat apakah digitalisasi benar-benar mengubah pola produksi persetujuan sebagaimana ditemukan dalam kasus Iran.

DAFTAR PUSTAKA

_____. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA

_____. (2010). Crime and Media, 1st Edition. London: Routledge

AlShebli, B., Casara, B. G. S., Maass, A. (2025). Media Coverage of War Victims: Journalistic Biases in Reporting on Israel and Gaza.

Amer, M. (2017). Critical discourse analysis of war reporting in the international press: the case of the Gaza war of 2008–2009. Palgrave Commun, 3(13). DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-017-0015-2. Https://www.nature.com/articles/s41599-017-0015-2

ANTARA News (2026). Trump katakan dia tidak ingin gencatan senjata di Iran. Sabtu, 21 Maret 2026, 08:56 WIB. https://www.antaranews.com/berita/5487814/trump-katakan-dia-tidak-ingin-gencatan-senjata-di-iran

Apul, M. M. B. (2022). Krisis Otonomi Media Lokal: Analisis Model Propaganda Herman-Chomsky pada Harian Victory News dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur NTT 2018. Jurnal Komunikatif, Vol. 11 No. 1. https://doi.org/10.33508/jk.v11i1.3799. https://journal.ukwms.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/3799

arXiv. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.06453. Https://arxiv.org/abs/2510.06453

Austin, J. L. (2026). How to Do Things with Words. Oxford University Press. https://philopedia.org/works/how-to-do-things-with-words

Bahari, M. N. R., Danuwijaya, T., Maryanto, E. T. (2025). NEGARA REPRESI DAN KETIMPANGAN GLOBAL: PENDEKATAN TEORI KRITIS TERHADAP ESKALASI PERANG IRAN-ISRAEL TAHUN 2025. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran, dan Administrasi Publik, Vol 5, No 2. https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814. https://www.scribd.com/document/942763113/14-Negara-Represi-Dan-Ketimpangan-Global-Pendekatan-Teori-Kritis-Terhadap-Eskalasi-Perang-Iran-Israel-Fix

Beetham, D. (1991). The Legitimation of Power. England: Macmillan

Beritasatu.com (2026). RI Absen, 3 Negara Jadi Mediator Gencatan Senjata AS–Iran. Selasa, 24 Maret 2026, 17:30 WIB. https://www.beritasatu.com/internasional/2978987/ri-absen-3-negara-jadi-mediator-gencatan-senjata-as-iran

Bisri, M. H., Subrata, I. D., Maulana, M. I., Rasyid, Y. R. (2022). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA DI CNN DAN CNBC INDONESIA. Perspektif Komunikasi, Vol. 6 No. 2. DOI: https://doi.org/10.24853/pk.6.2.247-259. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/13255

Buana, A. C., Bless, A. L. S., Rajendra, M. F., Cahya, S. O. (2024). Analisis Keamanan Timur Tengah: Eskalasi Konflik Israel-Iran. Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1 No. 6.

https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4716162

Budi, N. S., Gultom, E., Widjayanto, J. (2025). Implikasi Konflik Iran-Israel bagi Kebijakan Pertahanan Indonesia (Sebuah Refleksi Historis dari Pembelajaran Perang Diponegoro untuk Ketahanan Nasional). Bappenas Working Papers, Vol 8 No.3. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.468

Chodijah, A. P., Sugiyatno, F. A. S., Nurhajati, L. (2020). Framing Media Online "Detikcom" terkait Konflik AS–Iran Periode Januari 2020. Communicare : Journal of Communication Studies, Vol. 7 No. 1. DOI: https://doi.org/10.37535/101007120204. https://journal.lspr.edu/index.php/communicare/article/view/176

Cottle, S. (2006). Mediatized Conflict: Developments in Media and Conflict Studies. Open University Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches. In Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches. California: SAGE Publications

Dellmuth L, Tallberg J. (2023). Theory of Elite Influence and Popular Legitimacy. In: Legitimacy Politics: Elite Communication and Public Opinion in Global Governance. England: Cambridge University Press

Dogutas, A. (2026). Selective Humanitarianism: Western Media Bias and the Silencing of Gaza. The Blind Spot of Western Media: The Gaza Genocide, 11(26). DOI: 10.37679/trta.1827180. https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/article/1827180

Entman, R. M. (2004). Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy. University of Chicago Press.

Fayyaz, S. & Shirazi, R. (2013). Good Iranian, Bad Iranian: Representations of Iran and Iranians in Time and Newsweek (1998–2009). Iranian Studies , 46 (1). DOI: https://doi.org/10.1080/00210862.2012.740899. Https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00210862.2012.740899

Fossen, T. (2023). Facing Authority: A Theory of Political Legitimacy. USA: Oxford University Press

Gramsci, A. (1992). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.

Herman, A., Nurdiansa, J. (2010). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel - Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng. urnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8 No. 2. DOI:https://doi.org/10.31315/jik.v8i2.77. Https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view

Herman, E. S., & Chomsky, N. (2008). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books.

Hermann, D. H. J. (1983). Max Weber and the Concept of Legitimacy in Contemporary Max Weber and the Concept of Legitimacy in Contemporary Jurisprudence. Https://via.library.depaul.edu/law-review/vol33/iss1/1

Holzinger, K. (2004). Bargaining Through Arguing: An Empirical Analysis Based on Speech Act Theory. Political Communication, 21(2), 195–222. https://doi.org/10.1080/10584600490443886

https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.01803. https://arxiv.org/abs/2005.01803.

Hurd, I. (1999). Legitimacy andAuthority in International Politics. International Organization, 53(2). http://www.jstor.org/stable/2601393

Hurrelmann, A., Schneider, S., Steffek, J. (2007). Legitimacy in an Age of Global Politics. London: Palgrave Macmillan Miles, M. B., Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

iNews.id. (2026). Tolak Gencatan Senjata, Iran: Kami Ingin Beri Pelajaran kepada AS-Israel. Kamis, 12 Maret 2026, 07:00 WIB. https://www.inews.id/amp/news/internasional/tolak-gencatan-senjata-iran-kami-ingin-beri-pelajaran-kepada-as-israel

Isnaini, M., Sarwoprasodjo, S., Kinseng, R., Kholil (2018). Kajian Konflik Antar Kelompok dalam Perspektif Komunikasi Konflik selama periode 2003-2017 (Review of Intergroup Conflict in Conflict Communication Perspective Period 2003-2017). Vol. 20 No. 2 (2018): JURNAL IPTEK-KOM (JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI). DOI: https://doi.org/10.17933/iptekkom.20.2.2018.153-168. Https://jkd.komdigi.go.id/index.php/iptekkom/article/view/1678?utm

Klaehn, J. (2002). A Critical Review and Assessment of Herman and Chomsky's`PropagandaModel'. Sage Journals, Volume 17, Issue 2. https://doi.org/10.1177/0267323102017002691. Https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267323102017002691

Kompas.com (2026). Iran Tolak Gencatan Senjata, Tuntut Perang Diakhiri Total. 7 April 2026, 09:00 WIB. https://amp.kompas.com/tren/read/2026/04/07/090000665/iran-tolak-gencatan-senjata-tuntut-perang-diakhiri-total

Kumparan melalui YouTube (2026). RI Absen, 3 Negara Jadi Mediator Gencatan Senjata AS–Iran. Selasa, 24 Maret 2026, 17:30 WIB. https://www.youtube.com/watch?v=rXnUKRE5W7g

Kwak, H., An, J., Ahn, Y. Y. (2020). A Systematic Media Frame Analysis of 1.5 Million New York Times Articles from 2000 to 2017. Arxiv, Submitted on 4 May 2020.

McNair, B. (2011). An Introduction to Political Communication (5th ed.). London: Routledge.

Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muktaf, Z. M. PERANG DALAM MEDIA MASSA. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32945538/PERANG_DALAM_BINGKAI_PEMBERITAAN_KITA-libre.pdf?1392046179=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPerang_dalam_Bingkai_Pemberitaan_Kita.pdf&Expires=1779368938&Signature=IIzPVnkBDOByIsqyCBBquq~whvIEImLYlvxMlFevv1c7YuT6zz7O7El1Y2mSfRfIoO3IECyJ-I4ltb402baBPSK-z6pW4sbla9tgF-JQvD5cCTdLdw5IzVXFMTkm6hR8PXPYpmt3rzSlU-r76AiyglPmQ0bc~SpAlVABJ~3wxoISeX90RYzgcykPVvGYNO2iXB6-IYx9lhq~lYQQ--GlOsASjYygULWsKuen8ElrAV3Z0SK2dlzI8YIYRkFrrnUVNpFAica5lFxMgm8KGWXP9XEnxtozibdV-ARR6C84mfX9ezMgCpc052MX0Tc-

rVKUDzjxysxd6Ga4MzvLJDsdog__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Mullen, A dan Klaehn, J. (2010). The Herman–Chomsky Propaganda Model: A Critical Approach to Analysing Mass Media Behaviour. Sociology Compass, Vol 4 Np. 4. https://doi.org/10.1111/J.1751-9020.2010.00275.X. https://www.academia.edu/88040053/The_Herman_Chomsky_Propaganda_Model_A_Critical_Approach_to_Analysing_Mass_Media_Behaviour

Muslim (2015). VARIAN-VARIAN PARADIGMA, PENDEKATAN, METODE, DAN JENIS PENELITIAN DALAM ILMU KOMUNIKASI. Wahana, Vol. 1, No. 10. DOI: 10.33751/wahana.v1i10.654. https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/view/654

Mustofa, A. Z., & Syarifah, N. (2021). Politik Offensif Amerika Serikat Terhadap Sikap Defensif Iran: Dari Perang Proksi Hingga Dominasi. Indonesian Journal of International Relations, 5(2), 118–139. DOI:10.32787/ijir.v5i2.203. Https://www.researchgate.net/publication/354242530_POLITIK_OFENSIF_AMERIKA_SERIKAT_TERHADAP_SIKAP_DEFENSIF_IRAN_DARI_PERANG_PROKSI_HINGGA_DOMINASI

Nazir, Moh. (2017). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Netelenbos, B. (2016). Political Legitimacy beyond Weber. An Analytical Framework. London: Springer

Nimmo, D. (1989). Political Communication and Public Opinion in America. Goodyear Publishing.

Nurdyansa, N., Ismail, Fatma. (2025). ANALISIS FRAMING KOMPARATIF KONFLIK IRAN-ISRAEL PADA PEMBERITAAN DI AL JAZEERA DAN CNN INTERNATIONAL. Core: Journal Of Communication Research. Vol 3 No 2. DOI: https://doi.org/10.47650/core.v3i2.2222. https://journal.unpacti.ac.id/index.php/CORE/article/view

Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. Public Affairs.

Pemberitaan

RRI.Co.Id. (2026). Dewan Keamanan PBB Gagal Sahkan Gencatan Senjata Iran. 12 Mar 2026, 13:16 WIB. https://rri.co.id/internasional/2257622/about.html

Safitri, R. D., Mulyani, M., Simhadi, F. (2021). Teori Tindak Tutur dalam Studi Pragmatik. KABASTRA Kajian Bahasa dan Sastra, Vol 1 No. 1. DOI:10.31002/kabastra.v1i1.7

Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya, 15(1), 1–16. https://doi.org/10.33633/lite.v15i1.2382

Santi, W. N. D. P. dan Octavia, A. M. (2023). UPAYA RESOLUSI KONFLIK PERANG SAUDARA SOMALIA. JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK, Vol 5 No. 2. DOI: https://doi.org/10.24198/jkrk.v5i2.48119. https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/48119

Sarantakos, S. (2017). Social Resarch (4th editio). Bloomsbury Publishing

Seran, E. K. D. T., Marzaman, A. P. (2025). Program Nuklir Iran dan Ketegangan dengan Amerika Serikat: Analisis Geopolitik dan Implikasi terhadap

Stabilitas Timur Tengah. Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi, Vol. 2 No. 2. DOI: https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.322. Https://scirepid.com/storage/articles/pdfs/8231_20260309083227_program-nuklir-iran-dan-ketegangan-dengan-amerika_zusKn6St.pdf

Setiawan, S. (2025). DAMPAK RETALIASI IRAN KE ISRAEL TAHUN 2024 DI KAWASAN TIMUR TENGAH. Global Insights Journal, Vol. 2 No. 2. DOI : https://doi.org/10.36859/gij.v2i2.3312

Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive (2023). Political Legitimacy. https://plato.stanford.edu/archIves/fall2024/entries/legitimacy

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta

Supranto, J. (2016). Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga

UNESCO. (2024). World Trends in Freedom of Expression and Media Development Report.

Utomo, D., Rusadi, U., Sigit, R. R. (2023). FORGIVING THE UNFORGIVABLE: LANGUAGE POWER IN POLITICAL COMMUNICATION BETWEEN INDONESIA AND TIMOR-LESTE (Qualitative Research on Conflict Resolution over Human Rights Violations in East Timor, Before and After Referendum of 1999). International Journal of Social Science (IJSS), Vol.3 Issue.2. DOI: https://doi.org/10.53625/ijss.v3i2.6363. Https://www.researchgate.net/publication/373268294_FORGIVING_THE_UNFORGIVABLE_LANGUAGE_POWER_IN_POLITICAL_COMMUNICATION_BETWEEN_INDONESIA_AND_TIMOR-LESTE_Qualitative_Research_on_Conflict_Resolution_over_Human_Rights_Violations_in_East_Timor_Before_and

Viviani, R., dan Santoso, Y. W. (2025). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Israel pasca Serangan Konsulat di Damaskus. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.18, No. 1. https://doi.org/10.20473/jhi.v18i1.70397. https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/70397

Website

Wenyou, Y., & Ujčić, G. (2025). Narratives of Distortion: U.S. Institutional Media and the Polarization of Gaza War Coverage. APSA Preprints. DOI: 10.33774/apsa-2025-jbsvt. Https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/article-details/68c47ad83e708a7649b493ca

Wolfsfeld, G. (2004). Media and the Path to Peace. Cambridge University Press.

Zulfianullah, M. S. R (2025). Pembentukan norma Humanitarian Intervention: Peran NATO Dalam Krisis Libya 2011. Researchgate. Https://www.researchgate.net/publication/389438512_Pembentukan_norma_Humanitarian_Intervention_Peran_NATO_Dalam_Krisis_Libya_2011